



***E-GOVERNMENT* DAN KEWARGAAN DIGITAL DALAM MENGATASI  
KESENJANGAN KOMUNIKASI DAN ASIMETRI INFORMASI: STUDI  
KOMUNIKASI PUBLIK DI WILAYAH KEPULAUAN**

**Antasari Bandjar<sup>1</sup>, Rosdawiyah<sup>2</sup>, Pahrul Idham Kaliky<sup>3</sup>**  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pattimura<sup>1,2,3</sup>  
e-mail: [antasari.bandjar@unpatti.ac.id](mailto:antasari.bandjar@unpatti.ac.id)

Diterima: 4/5/2026; Direvisi: 13/5/026; Diterbitkan: 24/5/2026

**ABSTRAK**

Wilayah kepulauan menghadapi tantangan komunikasi publik yang dipengaruhi kondisi geografis terfragmentasi, keterbatasan konektivitas, serta rendahnya pemerataan akses informasi masyarakat. Situasi tersebut menyebabkan pelayanan publik dan distribusi informasi pemerintahan desa di Pulau Ambon belum berlangsung secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *e-government* sebagai medium komunikasi publik dalam mengurangi hambatan geografis serta mengkaji keterkaitannya dengan pembentukan *digital citizenship* pada masyarakat desa kepulauan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus ganda pada Desa Halong dan Desa Soya di Kota Ambon. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi praktik komunikasi digital desa, serta dokumentasi layanan publik berbasis digital. Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-government* mampu memperluas akses pelayanan publik, mempercepat distribusi informasi, dan mengurangi hambatan komunikasi akibat keterbatasan geografis wilayah kepulauan. Namun demikian, pemanfaatan platform digital masih berorientasi pada pelayanan administratif sehingga partisipasi masyarakat dalam ruang komunikasi digital desa belum berkembang secara optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan *digital citizenship* di wilayah kepulauan memerlukan integrasi antara teknologi digital, literasi masyarakat, dan budaya komunikasi lokal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih inklusif dan partisipatif.

**Kata Kunci:** *Komunikasi Publik, Kewargaan Digital, Kepulauan*

**ABSTRACT**

Archipelagic regions face public communication challenges influenced by fragmented geographical conditions, limited connectivity, and unequal access to public information. These conditions have caused public services and the distribution of governmental information in villages on Ambon Island to remain less than optimal, potentially creating communication gaps between the village government and the community. This study aims to analyze the implementation of *e-government* as a medium of public communication in reducing geographical barriers and to examine its relationship with the formation of *digital citizenship* within island village communities. The study employed a qualitative approach using a multiple case study design conducted in Halong Village and Soya Village, Ambon City. Research data were collected through in-depth interviews, observations of village digital communication practices, and documentation of digital-based public services. Data analysis was carried out thematically through data reduction, theme categorization, interpretation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of *e-government* has expanded access



to public services, accelerated information dissemination, and reduced communication barriers caused by the geographical limitations of archipelagic areas. However, the use of digital platforms remains primarily oriented toward administrative services, resulting in limited community participation in the village's digital public communication space. This study emphasizes that strengthening *digital citizenship* in archipelagic regions requires the integration of digital technology, community digital literacy, and local communication culture to establish a more inclusive and participatory village governance system.

**Keywords:** *Public Communication, Digital Citizenship, Archipelagic*

## PENDAHULUAN

Wilayah kepulauan memiliki dinamika pembangunan yang berbeda dibandingkan kawasan daratan karena dipengaruhi oleh keterpisahan ruang, keterbatasan konektivitas antardaerah, serta distribusi layanan publik yang cenderung tidak merata. Karakteristik tersebut tampak pada Pulau Ambon yang memiliki bentang wilayah berbukit, kawasan pesisir, dan pola permukiman yang menyebar sehingga aktivitas mobilitas masyarakat maupun penyebaran informasi publik sering menghadapi hambatan. Kondisi geografis tersebut menyebabkan akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan menjadi tidak selalu mudah dijangkau, terutama bagi desa-desa yang berada pada wilayah dengan keterhubungan transportasi terbatas. Nurhaeny et al. (2021) menjelaskan bahwa aksesibilitas antarwilayah di Kota Ambon masih dipengaruhi oleh faktor geografis yang berdampak pada rendahnya keterhubungan pelayanan dan pembangunan wilayah. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan di wilayah kepulauan tidak hanya berkaitan dengan persoalan infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh aspek komunikasi publik dan distribusi informasi pemerintahan kepada masyarakat desa.

Permasalahan komunikasi publik pada wilayah kepulauan berpotensi melahirkan kesenjangan komunikasi dan asimetri informasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Ketika arus informasi tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata, pelaksanaan kebijakan publik sering menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat, lemahnya keterlibatan warga, dan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah desa. Yudarwati dan Gregory (2022) menegaskan bahwa komunikasi pemerintahan yang efektif menjadi faktor penting dalam penguatan masyarakat pedesaan karena keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah membangun komunikasi yang partisipatif dan inklusif. Dalam perkembangan pemerintahan modern, teknologi digital mulai dimanfaatkan untuk memperluas akses komunikasi publik melalui penerapan *e-government* pada tingkat desa. Kehadiran *e-government* kemudian dipandang sebagai alternatif strategis untuk mengurangi hambatan komunikasi akibat kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dan tingginya biaya mobilitas masyarakat kepulauan.

Di tengah perkembangan komunikasi digital, masyarakat Maluku tetap mempertahankan praktik komunikasi tradisional yang tumbuh dari nilai budaya lokal dan struktur sosial masyarakat adat. Salah satu bentuk komunikasi tradisional yang masih bertahan hingga sekarang adalah Marinyo, yaitu lembaga penyampai informasi adat yang berfungsi menyebarluaskan pesan pemerintah negeri kepada masyarakat secara langsung. Penelitian Latuheru dan Bahfiarti (2025) menunjukkan bahwa Marinyo masih memiliki legitimasi sosial yang kuat karena dianggap mampu membangun kedekatan emosional, rasa percaya, dan kohesi sosial dalam komunikasi publik masyarakat Ambon. Selain itu, komunikasi berbasis kearifan lokal juga dinilai lebih mudah diterima masyarakat karena memiliki kedekatan budaya dan sosial yang kuat (Gonda et al., 2023). Meskipun demikian, pola komunikasi tradisional memiliki keterbatasan dalam aspek jangkauan informasi, kecepatan distribusi pesan, dan



efektivitas pelayanan ketika kebutuhan masyarakat semakin bergantung pada sistem pelayanan berbasis digital. Oleh sebab itu, integrasi antara komunikasi tradisional dan teknologi digital menjadi tantangan sekaligus kebutuhan baru dalam tata kelola komunikasi publik di wilayah kepulauan.

Transformasi digital pada pemerintahan desa berkembang semakin cepat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang efektif, transparan, dan mudah diakses. Pemerintah desa mulai memanfaatkan situs web, aplikasi pelayanan administrasi, dan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi publik maupun pelayanan masyarakat secara daring. Cahyati et al. (2022) menjelaskan bahwa penerapan *e-government* di daerah kepulauan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan meskipun masih menghadapi berbagai kendala infrastruktur dan keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian Mayyora et al. (2025) juga menunjukkan bahwa transformasi digital desa memiliki implikasi penting terhadap pembangunan berkelanjutan karena mampu memperluas akses pelayanan publik dan mempercepat distribusi informasi pemerintahan desa. Namun demikian, implementasi *e-government* di tingkat desa belum sepenuhnya mampu menciptakan keterlibatan masyarakat secara optimal karena masih dipengaruhi oleh kesenjangan akses internet, kemampuan penggunaan teknologi, dan kesiapan sosial masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital.

Persoalan literasi digital menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan pemerintahan digital pada masyarakat pedesaan dan wilayah kepulauan. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan teknologi menyebabkan pelayanan digital belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh kelompok sosial masyarakat. Pitrianti et al. (2023) menjelaskan bahwa masyarakat desa masih menghadapi keterbatasan dalam penggunaan media digital, terutama kelompok lansia dan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Kondisi tersebut diperkuat oleh penelitian Matutina dan Fahlevvi (2025) yang menunjukkan adanya kesenjangan generasi dan geografis dalam literasi digital yang berdampak terhadap ketimpangan partisipasi masyarakat dalam implementasi *e-government*. Sementara itu, Amalia dan Irawaty (2025) menegaskan bahwa penguatan literasi digital masyarakat desa merupakan strategi penting dalam memperluas akses informasi publik dan meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi perkembangan teknologi. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam ruang komunikasi publik berbasis digital.

Perkembangan partisipasi masyarakat dalam ruang digital kemudian melahirkan konsep *digital citizenship* yang menempatkan warga sebagai subjek aktif dalam kehidupan sosial dan pemerintahan berbasis teknologi. Konsep ini merujuk pada kemampuan masyarakat menggunakan teknologi digital secara etis, bertanggung jawab, partisipatif, dan inklusif dalam aktivitas sosial maupun pemerintahan. Tokovska et al. (2023) menjelaskan bahwa *digital citizenship* menjadi fondasi penting dalam pembangunan demokrasi digital karena masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam proses komunikasi publik dan pengambilan keputusan. Lynn et al. (2022) menambahkan bahwa keberadaan warga digital memiliki peran penting dalam transformasi masyarakat pedesaan karena teknologi memungkinkan masyarakat memperoleh akses lebih luas terhadap pelayanan publik, aktivitas ekonomi, dan ruang partisipasi sosial. Dalam konteks pemerintahan desa, keberadaan *digital citizenship* menjadi penting agar implementasi *e-government* tidak hanya berhenti pada digitalisasi pelayanan administrasi, tetapi berkembang menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan penguatan partisipasi warga desa.



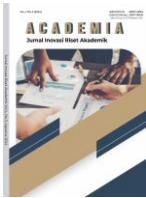
Hubungan antara *e-government*, partisipasi masyarakat, dan demokrasi digital semakin menjadi perhatian dalam berbagai penelitian kontemporer. Yaya dan Sukardi (2025) menemukan bahwa implementasi *e-government* yang didukung partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintahan desa. Arianto et al. (2025) menjelaskan bahwa demokrasi digital mampu menciptakan pola komunikasi yang lebih terbuka, horizontal, dan partisipatif antara pemerintah dengan masyarakat. Penelitian Faganello et al. (2025) juga menunjukkan bahwa *e-participation* pada tingkat lokal menjadi indikator penting keberhasilan pemerintahan digital karena masyarakat dapat terlibat dalam penyampaian aspirasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik secara lebih luas. Akan tetapi, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada efektivitas pelayanan administratif, transformasi teknologi pemerintahan, atau literasi digital secara parsial. Kajian yang menghubungkan *e-government*, komunikasi publik, komunikasi tradisional Marinyo, dan *digital citizenship* dalam konteks geografis wilayah kepulauan masih relatif terbatas, khususnya pada masyarakat desa di Pulau Ambon.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya memandang *e-government* sebagai instrumen administratif yang berorientasi pada efisiensi pelayanan publik, sedangkan dimensi komunikasi publik dan pembentukan partisipasi digital masyarakat belum banyak dianalisis secara mendalam. Padahal, pada wilayah kepulauan seperti Pulau Ambon, hambatan geografis, budaya komunikasi lokal, dan keterbatasan akses teknologi menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan transformasi digital pemerintahan desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian terkait bagaimana implementasi *e-government* dapat berfungsi sebagai medium komunikasi publik dalam mengurangi kesenjangan komunikasi dan asimetri informasi masyarakat kepulauan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui integrasi perspektif *e-government*, kesenjangan komunikasi, komunikasi tradisional Marinyo, dan *digital citizenship* dalam kerangka komunikasi publik wilayah kepulauan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran implementasi *e-government* dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan asimetri informasi serta mengkaji keterkaitannya dengan pembentukan *digital citizenship* masyarakat desa di Pulau Ambon. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap pengembangan komunikasi publik digital yang lebih inklusif, partisipatif, dan kontekstual pada wilayah kepulauan Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *field research* dan desain studi kasus ganda untuk memahami implementasi *e-government* sebagai medium komunikasi publik pada masyarakat kepulauan. Penelitian dilaksanakan di Desa Halong dan Desa Soya, Kota Ambon, Provinsi Maluku, karena kedua desa tersebut telah mengembangkan layanan pemerintahan berbasis digital serta memiliki karakteristik geografis berupa wilayah berbukit, permukiman tersebar, dan keterbatasan akses transportasi. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu keberadaan layanan digital pemerintahan desa dan kondisi geografis yang memengaruhi distribusi informasi publik masyarakat. Desain studi kasus ganda digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran *e-government* dalam mengurangi kesenjangan komunikasi dan asimetri informasi serta kaitannya dengan pembentukan *digital citizenship* pada masyarakat desa kepulauan.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelayanan administrasi dan komunikasi digital desa. Informan



penelitian terdiri atas dua kepala desa, dua sekretaris desa, dua operator layanan digital desa, dua fasilitator desa, serta delapan masyarakat desa dengan latar belakang usia, pekerjaan, dan tingkat penggunaan teknologi yang berbeda. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lebih komprehensif. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan melalui media digital dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, sedangkan observasi difokuskan pada aktivitas pelayanan administrasi digital, penggunaan situs web desa, serta pemanfaatan media sosial resmi pemerintah desa. Dokumentasi dilakukan terhadap arsip kebijakan desa, laporan pelayanan administrasi, konten informasi publik, dan tampilan platform digital desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema komunikasi publik, pelayanan digital, partisipasi masyarakat, dan praktik *digital citizenship*. Tahap interpretasi dilakukan dengan menelaah hubungan antara implementasi *e-government*, kesenjangan komunikasi, dan keterlibatan masyarakat dalam ruang komunikasi digital desa. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member checking* melalui konfirmasi ulang hasil wawancara kepada beberapa informan utama. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan implementasi *e-government* dalam konteks komunikasi publik masyarakat kepulauan di Pulau Ambon.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

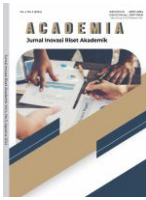
### Hasil

#### 1 Implementasi *E-Government* pada Desa Kepulauan di Pulau Ambon

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-government* pada desa-desa di Pulau Ambon masih berkembang secara bertahap dan belum diterapkan secara merata pada seluruh wilayah desa. Dari sekitar lima puluh desa yang berada di Pulau Ambon, hanya tujuh desa yang telah mengembangkan pelayanan publik berbasis digital, yaitu Desa Rutong, Passo, Halong, Latuhalat, Soya, Hunuth, dan Nania. Bentuk layanan digital yang dikembangkan meliputi administrasi kependudukan berbasis daring, pelayanan surat-menyurat elektronik, publikasi informasi desa melalui situs web, serta pemanfaatan media sosial resmi pemerintah desa. Berdasarkan data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2023, Pulau Ambon masih berada pada kategori indeks rendah dengan skor 47,7 sehingga menunjukkan bahwa transformasi digital di wilayah kepulauan masih dipengaruhi keterbatasan infrastruktur jaringan, akses internet, dan konektivitas antarwilayah. Dalam penelitian ini, Desa Halong dan Desa Soya dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik geografis berupa wilayah berbukit, permukiman tersebar, dan akses transportasi yang relatif terbatas. Karakteristik implementasi *e-government* pada kedua desa penelitian disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Karakteristik Implementasi *E-Government* di Desa Penelitian**

Desa	Karakteristik Geografis	Bentuk Implementasi <i>E-Government</i>	Media Digital yang Digunakan
Halong	Wilayah berbukit dan permukiman tersebar	Administrasi kependudukan digital dan pelayanan informasi publik	Website desa, Facebook, DIGIDES
Soya	Topografi pegunungan dan akses transportasi terbatas	Pelayanan administrasi berbasis digital dan publikasi informasi desa	Website desa dan media sosial resmi



Berdasarkan Tabel 1, kedua desa penelitian telah memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari pelayanan publik meskipun berada pada wilayah dengan hambatan geografis yang cukup tinggi. Implementasi *e-government* di kedua desa lebih banyak difokuskan pada pelayanan administrasi kependudukan dan penyebaran informasi publik kepada masyarakat. Pemerintah desa memanfaatkan situs web dan media sosial untuk mempercepat penyampaian informasi sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh layanan administrasi tanpa harus selalu datang langsung ke kantor desa. Penggunaan aplikasi DIGIDES di Desa Halong juga menunjukkan adanya upaya adaptasi pemerintah desa dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat kepulauan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa teknologi digital mulai digunakan tidak hanya sebagai sarana administratif, tetapi juga sebagai medium komunikasi publik untuk memperluas akses pelayanan masyarakat desa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi geografis menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pemerintah desa mengembangkan pelayanan berbasis digital. Sekretaris Desa Halong menjelaskan bahwa masyarakat sering mengalami kesulitan ketika harus mengurus administrasi secara langsung karena tingginya biaya transportasi dan terbatasnya kendaraan umum menuju kantor desa. Informan menyampaikan:

*“Kalau masyarakat datang langsung ke kantor desa, biaya transportasi cukup besar karena sebagian besar harus menggunakan ojek. Sekali perjalanan bisa mencapai lima puluh ribu rupiah.”* (Sekretaris Desa Halong)

Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Soya yang memiliki bentang wilayah luas dengan permukiman warga yang berjauhan. Warga tidak hanya menghadapi biaya transportasi yang tinggi, tetapi juga harus membawa berbagai dokumen fisik dan melakukan perjalanan berulang kali untuk melengkapi persyaratan administrasi. Salah satu informan masyarakat menyampaikan:

*“Sebelum ada pelayanan digital, kami harus beberapa kali datang ke kantor desa hanya untuk melengkapi berkas administrasi.”* (Warga Desa Soya)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan geografis di wilayah kepulauan tidak hanya memengaruhi mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap akses pelayanan publik dan distribusi informasi pemerintahan desa. Kondisi wilayah berbukit, permukiman yang tersebar, dan keterbatasan transportasi menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya serta waktu yang relatif besar untuk memperoleh layanan administrasi. Situasi tersebut mendorong pemerintah desa mulai mengembangkan pelayanan berbasis digital sebagai alternatif untuk memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Implementasi *e-government* pada konteks ini berkembang sebagai strategi pelayanan sekaligus sarana komunikasi publik yang membantu memperluas jangkauan layanan pemerintahan desa di wilayah kepulauan.

## **2 Kesenjangan Komunikasi dan Dampak Digitalisasi Pelayanan Publik**

Penelitian menemukan bahwa penerapan *e-government* memberikan perubahan terhadap pola komunikasi publik antara pemerintah desa dan masyarakat. Sebelum adanya pelayanan digital, penyebaran informasi publik lebih banyak dilakukan melalui komunikasi lisan, aparat desa, dan pertemuan langsung yang memiliki keterbatasan jangkauan serta kecepatan distribusi informasi. Setelah penggunaan media digital mulai diterapkan, pemerintah desa memanfaatkan situs web dan media sosial untuk menyampaikan pengumuman, informasi pelayanan, dan kegiatan desa secara lebih cepat dan terbuka. Perubahan tersebut

memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Selain itu, masyarakat yang berada di luar wilayah desa tetap dapat memperoleh informasi maupun mengakses pelayanan administrasi secara daring. Temuan utama penelitian terkait perubahan komunikasi publik desa sebelum dan sesudah implementasi *e-government* disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Temuan Utama Implementasi *E-Government* pada Desa Penelitian**

Tema Temuan	Kondisi Sebelum Digitalisasi	Kondisi Setelah Digitalisasi
Akses pelayanan publik	Warga harus datang langsung ke kantor desa	Sebagian layanan dapat diakses secara daring
Distribusi informasi	Informasi disampaikan secara lisan dan terbatas	Informasi dapat disebarakan melalui media digital
Biaya administrasi	Biaya transportasi masyarakat relatif tinggi	Pengeluaran masyarakat lebih berkurang
Komunikasi pemerintah dan warga	Bersifat tatap muka dan terbatas waktu	Interaksi berlangsung lebih cepat dan fleksibel
Partisipasi masyarakat	Aspirasi masyarakat disampaikan secara langsung	Warga mulai menggunakan media digital untuk komunikasi desa

Berdasarkan Tabel 2, implementasi *e-government* memberikan perubahan terhadap pola pelayanan administrasi dan komunikasi publik pada desa penelitian. Penggunaan media digital membantu pemerintah desa mempercepat distribusi informasi sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh layanan administrasi tanpa harus selalu hadir secara fisik di kantor desa. Digitalisasi pelayanan juga membantu mengurangi biaya transportasi masyarakat dan memperpendek waktu pelayanan administrasi. Selain itu, penggunaan media sosial dan platform digital desa mulai menciptakan pola komunikasi yang lebih fleksibel karena masyarakat dapat memperoleh informasi publik dan menyampaikan kebutuhan administrasi secara lebih cepat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital mulai berfungsi sebagai medium komunikasi publik yang mendukung efektivitas pelayanan pemerintahan desa di wilayah kepulauan.

Hasil wawancara dengan operator layanan digital desa menunjukkan bahwa penggunaan media digital membantu meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat, terutama bagi warga yang berada di luar daerah. Operator DIGIDES Desa Halong menjelaskan:

*“Sekarang masyarakat yang berada di luar daerah juga bisa mengurus beberapa kebutuhan administrasi tanpa harus langsung datang ke desa.”* (Operator DIGIDES Desa Halong)

Selain itu, pemerintah desa juga menilai bahwa media sosial mempermudah penyampaian informasi publik secara lebih cepat dibandingkan metode komunikasi sebelumnya. Salah satu perangkat desa menyatakan:

*“Kalau ada pengumuman desa, sekarang lebih cepat tersebar karena masyarakat langsung melihat informasi di media sosial desa.”* (Perangkat Desa Soya)

Informasi terkait kegiatan desa, pengumuman administrasi, maupun pelayanan publik dapat diterima masyarakat dalam waktu yang lebih singkat melalui platform digital desa.



Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa media digital mulai menjadi bagian penting dalam mendukung komunikasi pemerintahan desa di wilayah kepulauan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa implementasi *e-government* di wilayah kepulauan mulai mengubah pola komunikasi publik dari model konvensional menuju komunikasi digital yang lebih terbuka dan responsif. Kehadiran pelayanan digital tidak hanya mempermudah akses administrasi masyarakat, tetapi juga memperluas akses informasi publik desa pada wilayah yang secara geografis terfragmentasi. Masyarakat mulai memanfaatkan media digital untuk memperoleh informasi pelayanan, menyampaikan pertanyaan, serta merespons pengumuman pemerintah desa secara lebih cepat. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital pada desa kepulauan mulai membentuk praktik komunikasi yang lebih partisipatif dan mendukung perkembangan *digital citizenship* pada tingkat lokal. Dengan demikian, implementasi *e-government* berkembang tidak hanya sebagai inovasi administratif, tetapi juga sebagai medium komunikasi publik yang membantu mengurangi kesenjangan komunikasi dan asimetri informasi masyarakat kepulauan.

### **Pembahasan**

Implementasi *e-government* pada Desa Halong dan Desa Soya memperlihatkan bahwa teknologi digital mulai berfungsi sebagai instrumen adaptasi sosial dalam menghadapi hambatan geografis wilayah kepulauan. Karakteristik wilayah berupa topografi berbukit, permukiman yang tersebar, dan keterbatasan transportasi membuat pelayanan administratif berbasis tatap muka menjadi kurang efisien bagi masyarakat desa. Dalam situasi tersebut, penggunaan layanan digital tidak hanya dimaknai sebagai modernisasi birokrasi, tetapi juga sebagai strategi komunikasi publik untuk memperpendek jarak pelayanan antara pemerintah desa dan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital di wilayah kepulauan memiliki dimensi sosial yang lebih kompleks dibandingkan wilayah perkotaan karena berkaitan langsung dengan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan Mardinata et al. (2023) yang menjelaskan bahwa transformasi digital desa melalui sistem informasi desa mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memperluas jangkauan layanan pemerintahan. Mayyora et al. (2025) juga menegaskan bahwa digitalisasi desa menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan karena mendukung penguatan tata kelola pemerintahan dan akses informasi masyarakat pada wilayah rural dan kepulauan.

Perubahan pola komunikasi publik menjadi implikasi penting dari implementasi *e-government* pada kedua desa penelitian. Sebelum penggunaan media digital, komunikasi pemerintah desa lebih banyak berlangsung melalui penyampaian informasi secara lisan, pengumuman langsung, dan interaksi tatap muka yang memiliki keterbatasan dalam kecepatan distribusi informasi. Setelah pemerintah desa memanfaatkan situs web, media sosial resmi, dan aplikasi DIGIDES, proses penyampaian informasi publik berlangsung lebih cepat serta mampu menjangkau masyarakat yang berada di luar wilayah desa. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran pola komunikasi publik dari komunikasi konvensional menuju komunikasi digital yang lebih terbuka dan fleksibel. Dalam perspektif komunikasi pemerintahan, kondisi ini memperlihatkan bahwa media digital mulai berfungsi sebagai ruang interaksi baru antara pemerintah desa dan masyarakat. Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi Yudarwati dan Gregory (2022) bahwa komunikasi pemerintahan yang efektif berperan penting dalam mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Penelitian Karinda et al. (2024) juga menunjukkan bahwa integrasi



komunikasi pemerintahan digital melalui situs web desa mampu meningkatkan transparansi pelayanan dan mempercepat distribusi informasi publik kepada masyarakat desa.

Meskipun implementasi *e-government* telah membantu memperluas akses pelayanan publik, penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan akses digital belum sepenuhnya diikuti peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif. Pemanfaatan teknologi digital pada Desa Halong dan Desa Soya masih lebih dominan digunakan untuk kebutuhan administratif dan penyebaran informasi publik dibandingkan sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital desa masih berada pada tahap digitalisasi birokrasi dan belum berkembang sepenuhnya menjadi ruang komunikasi partisipatif berbasis *digital citizenship*. Dalam konteks ini, keberadaan teknologi digital masih diposisikan sebagai alat pelayanan, bukan sebagai medium kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan Tokovska et al. (2023) yang menjelaskan bahwa keberhasilan *e-government* tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan digital, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk terlibat aktif dalam ruang komunikasi digital pemerintahan. Khaerunnisa et al. (2025) turut menegaskan bahwa implementasi *e-government* akan lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi publik apabila masyarakat memiliki akses, kemampuan digital, dan ruang interaksi yang memadai dalam sistem pelayanan berbasis teknologi.

Berdasarkan kerangka *digital citizenship* yang dikemukakan Tokovska et al. (2023), implementasi *e-government* pada kedua desa penelitian dapat dipahami berada pada fase informasional dan interaksional, tetapi belum sepenuhnya mencapai fase transaksional dan partisipatif. Pemerintah desa telah mampu menyediakan akses informasi publik melalui situs web dan media sosial resmi, sedangkan masyarakat mulai menggunakan media digital untuk menyampaikan pertanyaan maupun kebutuhan administrasi. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan pengawasan pembangunan desa masih berlangsung secara terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi digital yang berkembang pada desa penelitian belum sepenuhnya membentuk ruang deliberatif yang memungkinkan warga terlibat aktif dalam proses pemerintahan desa. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa transformasi menuju *digital citizenship* membutuhkan proses sosial yang bertahap dan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi digital. Temuan penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Khaerunnisa et al. (2025) yang menemukan bahwa implementasi *e-government* pada desa tertentu mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dalam pelayanan publik. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan partisipasi digital sangat dipengaruhi kondisi sosial masyarakat, kapasitas kelembagaan desa, dan kesiapan infrastruktur digital pada masing-masing wilayah.

Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam implementasi *e-government* juga dipengaruhi oleh masih terjadinya kesenjangan digital pada wilayah kepulauan. Penelitian ini menemukan bahwa akses terhadap perangkat digital dan internet belum dimiliki secara merata oleh seluruh masyarakat desa, terutama kelompok lansia dan masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah. Keterbatasan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu memanfaatkan pelayanan digital secara optimal meskipun layanan telah tersedia. Dalam perspektif pembangunan komunikasi digital, kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan kesiapan sosial masyarakat. Hambatan akses dan kemampuan digital masyarakat berpotensi menciptakan ketimpangan baru dalam pelayanan publik apabila tidak diimbangi dengan penguatan literasi digital secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan Matutina dan Fahlevvi (2025) yang menjelaskan bahwa kesenjangan geografis dan generasi menjadi faktor utama rendahnya literasi digital masyarakat dalam



implementasi *e-government* di wilayah rural Indonesia. Arsyad et al. (2023) juga menegaskan bahwa peningkatan literasi digital masyarakat desa menjadi syarat penting dalam memperkuat keterlibatan warga pada pelayanan publik berbasis teknologi digital. Selain itu, Kunnati et al. (2025) menjelaskan bahwa kesenjangan digital di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan akses teknologi, tetapi juga dipengaruhi ketimpangan sosial dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif.

Selain dipengaruhi faktor sosial masyarakat, implementasi *e-government* pada desa kepulauan juga masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan pemerintah desa. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas jaringan internet pada beberapa wilayah permukiman masih belum stabil sehingga pelayanan digital belum dapat berjalan secara optimal. Di sisi lain, kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan sistem digital juga masih terbatas sehingga inovasi pelayanan berbasis teknologi belum berkembang secara maksimal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan transformasi digital desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi pelayanan, tetapi juga dipengaruhi kesiapan sumber daya manusia dan keberlanjutan sistem teknologi yang digunakan. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan *e-government* pada wilayah kepulauan memerlukan dukungan kebijakan, penguatan kapasitas aparatur, dan pemerataan infrastruktur digital. Temuan penelitian ini sejalan dengan Abdillah (2025) yang menyatakan bahwa tantangan utama implementasi pelayanan publik digital di tingkat desa meliputi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan keberlanjutan pengelolaan sistem digital desa. Penelitian Sopyan et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pengembangan desa digital membutuhkan pengelolaan konten informasi publik yang konsisten serta dukungan teknologi informasi yang memadai agar komunikasi publik digital dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa budaya komunikasi masyarakat kepulauan masih menunjukkan kecenderungan kuat terhadap interaksi tatap muka dibandingkan komunikasi digital. Sebagian masyarakat menilai bahwa komunikasi langsung lebih mudah dipahami dan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan pelayanan berbasis teknologi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital desa tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan teknologi, tetapi juga sebagai perubahan budaya komunikasi masyarakat lokal. Dalam konteks masyarakat Ambon, komunikasi tradisional masih memiliki posisi penting dalam membangun kedekatan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, implementasi *e-government* tidak sepenuhnya menggantikan pola komunikasi lama, melainkan berjalan berdampingan dengan praktik komunikasi berbasis komunitas lokal. Temuan ini mendukung penelitian Gonda et al. (2023) yang menjelaskan bahwa pelayanan publik berbasis teknologi tetap perlu mempertimbangkan karakter sosial dan budaya komunikasi masyarakat setempat. Dengan demikian, implementasi *e-government* pada wilayah kepulauan cenderung membentuk pola komunikasi hibrid yang mengombinasikan komunikasi digital dengan komunikasi berbasis komunitas lokal.

Dalam perspektif pembangunan masyarakat dan demokrasi digital, implementasi *e-government* pada Desa Halong dan Desa Soya dapat dipahami sebagai tahap awal pembentukan *digital citizenship* masyarakat kepulauan. Kehadiran pelayanan digital telah membantu mengurangi hambatan geografis, mempercepat distribusi informasi publik, dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi desa. Akan tetapi, proses tersebut belum sepenuhnya menghasilkan keterlibatan masyarakat yang aktif dalam pengawasan maupun pengambilan keputusan publik desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan *digital citizenship* memerlukan proses bertahap yang melibatkan peningkatan akses digital,



literasi masyarakat, partisipasi publik, dan penguatan ruang komunikasi partisipatif. Penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi *e-government* pada wilayah kepulauan tidak cukup dipahami sebagai proses digitalisasi birokrasi semata, tetapi juga sebagai proses sosial yang berkaitan dengan transformasi budaya komunikasi dan pembangunan demokrasi digital masyarakat lokal. Temuan ini memperkuat pandangan Lynn et al. (2022) bahwa *digital citizenship* berkembang melalui peningkatan akses, kemampuan digital, partisipasi, dan integrasi sosial masyarakat dalam ruang digital. Arianto et al. (2025) juga menjelaskan bahwa demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga oleh keterlibatan warga dalam komunikasi publik dan proses pengambilan kebijakan pemerintahan. Yaya dan Sukardi (2025) menambahkan bahwa implementasi *e-government* yang disertai partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, penelitian Lol et al. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan layanan *e-government* di wilayah kepulauan sangat dipengaruhi kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam membangun *value co-creation* melalui interaksi digital yang kolaboratif.

## KESIMPULAN

Implementasi *e-government* pada Desa Halong dan Desa Soya menunjukkan bahwa transformasi digital di wilayah kepulauan tidak hanya berkaitan dengan perubahan sistem administrasi pemerintahan, tetapi juga berhubungan dengan perubahan pola komunikasi publik antara pemerintah desa dan masyarakat. Kehadiran layanan berbasis digital mampu membantu masyarakat mengatasi hambatan geografis yang selama ini memengaruhi akses pelayanan administrasi, distribusi informasi publik, dan efisiensi komunikasi pemerintahan desa. Pemanfaatan situs web desa, media sosial resmi, dan layanan administrasi digital terbukti mempercepat penyampaian informasi serta memperluas jangkauan pelayanan publik pada masyarakat kepulauan. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa perluasan akses pelayanan digital belum sepenuhnya diikuti oleh keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan publik desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *e-government* tidak hanya diukur dari efisiensi pelayanan administratif, tetapi juga dari kemampuan sistem digital dalam membangun komunikasi publik yang partisipatif dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi *e-government* pada masyarakat kepulauan masih berada pada fase transisi dari digitalisasi birokrasi menuju penguatan *digital citizenship* berbasis partisipasi masyarakat.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pengembangan *digital citizenship* pada wilayah kepulauan dipengaruhi oleh hubungan antara faktor sosial, budaya, dan struktural masyarakat desa. Keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital masyarakat, ketimpangan kepemilikan perangkat teknologi, serta kuatnya budaya komunikasi tatap muka menjadi faktor yang memengaruhi belum optimalnya partisipasi digital masyarakat desa. Temuan tersebut memberikan kontribusi teoritis dengan menunjukkan bahwa implementasi *e-government* di wilayah kepulauan memerlukan pendekatan komunikasi yang kontekstual dan tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan karakter wilayah perkotaan yang memiliki kesiapan teknologi lebih baik. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa komunikasi publik pada masyarakat kepulauan berkembang dalam pola komunikasi hibrid yang memadukan interaksi digital dengan komunikasi berbasis komunitas lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan budaya komunikasi lokal, kondisi geografis kepulauan, dan kesenjangan digital sebagai unsur penting dalam proses pembentukan komunikasi publik digital dan *digital citizenship* pada tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian *e-government*

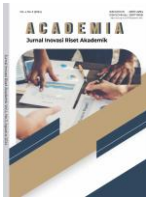


dan *digital citizenship* melalui perspektif komunikasi publik masyarakat kepulauan yang selama ini masih relatif terbatas dibahas dalam penelitian terdahulu.

Prospek pengembangan *e-government* pada wilayah kepulauan memerlukan penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa secara berkelanjutan agar transformasi digital tidak berhenti pada aspek administratif semata. Peningkatan literasi digital masyarakat, pemerataan akses teknologi informasi, penguatan infrastruktur internet, dan pengembangan platform pelayanan yang lebih partisipatif menjadi langkah penting untuk memperkuat keterlibatan warga dalam tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, pengembangan layanan digital berbasis potensi ekonomi lokal dan penguatan integrasi antarlembaga pemerintahan dapat memperluas manfaat *e-government* bagi pembangunan masyarakat kepulauan secara lebih berkelanjutan. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan model komunikasi publik digital yang sesuai dengan karakter sosial dan budaya masyarakat kepulauan, termasuk mengkaji pola komunikasi hibrid antara layanan digital dan komunikasi tatap muka dalam pelayanan publik desa. Dengan demikian, *e-government* tidak hanya dipahami sebagai inovasi teknologi pemerintahan, tetapi juga sebagai fondasi pembangunan komunikasi publik yang lebih inklusif, partisipatif, dan demokratis pada masyarakat kepulauan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, S. S. (2025). Inovasi pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa: Studi kasus penerapan aplikasi SiDesa di Kabupaten Banyumas analisis efektivitas dan tantangan implementasi *e-government* desa. *Journal Sains Student Research*, 3(4), 820–822. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/5898>
- Amalia, A. D. R., & Irawaty, F. (2025). Peningkatan kapasitas literasi digital masyarakat desa melalui pelatihan teknologi informasi sebagai strategi penguatan kemandirian dan akses informasi di era digital. *Daya Karya: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 1–11. <https://indosainstech.id/journal/dayakarya/article/view/8>
- Arianto, B., Madu, L., & Anggraini, O. (2025). *Demokrasi digital: Pendekatan konseptual*. <https://media.neliti.com/media/publications/639969-demokrasi-digital-pendekatan-konseptual-c9fda967.pdf>
- Arsyad, A. A. H. J., Sulistyono, L., Rahayu, W., & Fatmawati, E. (2023). Upaya peningkatan literasi digital masyarakat melalui program pelatihan komputer di desa terpencil. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 654–661. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/12430>
- Cahyati, I., Muhammad, A. S., & Edison, E. (2022). Efektivitas penerapan *e-government* di daerah kepulauan (studi pelayanan sistem informasi administrasi kependudukan oleh unit pelaksana teknis daerah Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur). *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 460–469. <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/1715>
- Faganello, C. P., Luciano, E. M., & Pereira, G. V. (2025). What do we know about *e-participation* at the local level? In *Conference on Digital Government Research* (Vol. 26). <https://doi.org/10.59490/dgo.2025.1035>
- Gonda, M. S., Bahfiarti, T., & Farid, M. (2023). Implementasi komunikasi organisasi berbasis kearifan lokal dalam pelayanan publik. *Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(3), 518–534. <https://doi.org/10.33822/jep.v6i3.6391>
- Karinda, K., Kede, A., Septiana, G. L., Jayalangi, L. O. S., Sibay, S., & Ulfa, M. (2024). Integrasi komunikasi pemerintahan digital melalui situs web resmi: Studi kasus di Desa



- Tontouan, Kecamatan Luwuk. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 13. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.110>
- Khaerunnisa, M., Razak, M. R. R., & Syarifuddin, H. (2025). Penerapan *e-government* dalam meningkatkan partisipasi publik di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 8(02), 802–814. <https://doi.org/10.36341/jdp.v8i02.6538>
- Kunnati, K., Supriadi, A., Yuliyati, I., & Listiyaningsih, L. (2025). Kesenjangan digital dalam *telemedicine* sebagai faktor penentu ketimpangan kesehatan di Indonesia: *The digital divide in telemedicine as a determinant of health inequities in Indonesia: A scoping review*. *Journal of Public Health Education*, 4(3), 90–102. <https://journals.prosciences.net/index.php/JPHE/article/view/422>
- Latuheru, R., & Bahfiarti, T. (2025). *Marinyo* as a medium of traditional communication in the digital era: Hybridization, opinion leadership, and cultural sustainability in Ambonese society. *Frontiers in Communication*. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1602249>
- Lol, W. G., Petrova, K., & Pais, S. (2025). Value co-creation for *e-government* services in small island developing nations: A case study. *Information*, 16(7), 613. <https://doi.org/10.3390/info16070613>
- Lynn, T., Rosati, P., Conway, E., Curran, D., Fox, G., & O’Gorman, C. (2022). The digital citizen. In *Digital towns: Accelerating and measuring the digital transformation of rural societies and economies* (pp. 23–47). Springer International Publishing. [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-91247-5\\_2](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-91247-5_2)
- Mardinata, E., Cahyono, T. D., & Rizqi, R. M. (2023). Transformasi digital desa melalui sistem informasi desa (*SID*): Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 73–81. <https://doi.org/10.38043/parta.v4i1.4402>
- Matutina, E. J. B., & Fahlevvi, M. R. (2025). Kesenjangan generasi dan geografis dalam literasi digital: Implikasinya terhadap kebijakan *e-government* di Kabupaten Sorong. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 7(2), 201–216. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v7i2.5771>
- Mayyora, R., Sholihah, Q., Wanusmawatie, I., & Wanto, A. H. (2025). Transformasi digital desa dan implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan: Pendekatan *literature review*. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 100–111. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i2.615>
- Nurhaeny, A., Miharja, M., Pradono, P., & Dirgahayani, P. (2021). Measuring accessibility and island development in Ambon City. *Island Studies Journal*, 16(1), 373–387. <https://islandstudiesjournal.org/article/84710-measuring-accessibility-and-island-development-in-ambon-city>
- Pitrianti, S., Sampetoding, E. A., Purba, A. A., & Pongtambang, Y. S. (2023, November). Literasi digital pada masyarakat desa. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(1), 43–49. <https://sitasi.upnjatim.ac.id/index.php/sitasi/article/view/655>
- Sopyan, E., Prasetyo, Y. D., Apriadi, E. A., & Chairunnisa, C. (2025). Desa digital dan informatif: Visualisasi dan manajemen konten layanan publik berbasis teknologi informasi di Pemerintahan Desa Kunjir Lampung Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 6(01), 61–75. <https://doi.org/10.24967/jams.v6i01.4184>



- Tokovska, M., Ferreira, V. N., Vallušova, A., & Seberíni, A. (2023). *E-government—The inclusive way for the future of digital citizenship*. *Societies*, 13(6), 141. <https://doi.org/10.3390/soc13060141>
- Yaya, R., & Sukardi, S. (2025). Pengaruh implementasi *e-government* dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dengan *good government governance* sebagai variabel pemoderasi. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 10(1), 69–81. <https://doi.org/10.32502/balance.v10i1.600>
- Yudarwati, G. A., & Gregory, A. (2022). Improving government communication and empowering rural communities: Combining public relations and development communication approaches. *Public Relations Review*, 48(3), 102200. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2022.102200>